

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DI NAGARI SUNGAI BULUAH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Julia Nanda Rasifa^{1(a)}, Dasman Lanin^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}juliananda.rasifa@gmail.com, ^{b)}dasmanlanin@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

18-05-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

Kata Kunci:

Pemerintah Nagari,
Pemberdayaan Masyarakat,
Ekonomi Produktif

Keywords:

Village Government,
Community Empowerment,
Productive Economy

Corresponding Author:

juliananda.rasifa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan ekonomi produktif di Nagari Sungai Buluah serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif belum optimal. Dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator, belum adanya peraturan khusus mengenai pemberdayaan ekonomi produktif di Nagari Sungai Buluah. Sebagai dinamisor, yaitu pelatihan dan pendampingan baru dilakukan satu kali yaitu selama 20 hari, akan tetapi waktunya tidak efektif dikarenakan kedisiplinan anggota. Sebagai fasilitator, sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi produktif.

ABSTRACT

This research was conducted in Nagari Sungai Buluah, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. The aim was to describe the role of the nagari government in empowering the productive economy in Nagari Sungai Buluah and to find out what the supporting and inhibiting factors were in carrying out this empowerment. This research is a qualitative research with descriptive method. Techniques and data collection through observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data using triangulation techniques. The data analysis technique used in this study is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research that has been done, it shows that the role of the nagari government in community empowerment through productive economic activities is not optimal. Viewed from the aspect of the government as a regulator, there is no specific regulation regarding productive economic empowerment in Nagari Sungai Buluah. As a dynamist, namely training and mentoring was only carried out once, namely for 20 days, but the time was not effective due to the discipline of the members. As a facilitator, inadequate facilities and infrastructure to realize productive economic empowerment.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i2.88>

PENDAHULUAN

Pemerintah nagari merupakan unit pemerintahan yang langsung melayani dan berhubungan dengan masyarakat serta berperan strategis dalam melakukan pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari dalam pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa wali nagari memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lebih lanjut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nugroho, 2013 (dalam Hermawan, Endang, dkk, 2021) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya menjadikan masyarakat mandiri dengan cara mewujudkan peluang sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut Ulumiyah, dkk (2013) mengatakan pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dengan membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, yang dimaksud dengan nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu, dan berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman.

Nagari Sungai Buluah merupakan salah satu nagari yang terletak di kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil pencatatan jumlah penduduk tahun 2022, penduduk di nagari Sungai Buluah sebanyak 2.447 jiwa, dengan jumlah 628 KK. Dari 628 KK tersebut masih banyak keluarga yang tergolong pra sejahtera. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

No	Strata Keluarga	Jumlah (KK)
1.	Keluarga Prasejahtera	260
2.	Keluarga Sejahtera 1	256
3.	Keluarga Sejahtera 2	80
4.	Keluarga Sejahtera 3	25
5.	Keluarga Sejahtera 3+	7
Total		628

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak keluarga yang tergolong pra sejahtera yaitu sebanyak 260 KK (42%) dari total jumlah KK di nagari Sungai Buluah. Maka dari hal tersebut untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah nagari Sungai Buluah membuat program sebagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nagari.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris nagari Sungai Buluah, Kegiatan ekonomi produktif di nagari Sugai Buluah ada tiga, yaitu (1) menjahit, (2) bordir, dan (3) karangan bunga. Ketiga kegiatan ekonomi produktif tersebut dibentuk berdasarkan hasil musyawarah bersama dan atas pertimbangan peluang usahanya, dengan tujuan agar ibu ibu rumah tangga atau anak dalam usia produktif bisa membantu perekonomian keluarganya.

Pemberdayaan ekonomi produktif, pemerintah nagari mengajak masyarakat untuk mengikuti program nagari tersebut. Pemerintah nagari sebagai pemimpin dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif ini sudah menyediakan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan agar kelompok kelompok tersebut dapat berdaya. Fasilitas yang diberikan pemerintah ialah bangunan atau tempat, bantuan alat seperti mesin menjahit, mesin bordir, dll. Akan tetapi program ekonomi produktif yang di buat oleh pemerintah nagari, seperti menjahit, bordir, dan karangan bunga, berdasarkan pengamatan dan wawancara masi belum produktif. Ada terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan kegiatannya. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

- Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari;
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah nagari;
- Pemerintah nagari kurang mencarikan mitra dalam pemasaran produk.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah nagari dalam

memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi produktif di nagari Sungai Buluah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ialah wali nagari dan sekretaris nagari Sungai Buluah serta ketua atau anggota kelompok ekonomi produktif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Sementara teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas Wali Nagari adalah dalam hal pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menjadikan masyarakat mandiri dengan membantu mereka mengembangkan pola pikir berdasarkan potensi yang dimiliki. Di Nagari Sungai Buluah terdapat tiga kelompok ekonomi produktif, yaitu (1) kelompok Menjahit, (2) kelompok Bordir, dan (3) kelompok Karangany Bunga. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, dengan menggunakan teori peran Musa, yang terdiri dari tiga peran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif yaitu:

Regulator, pemerintah berperan dalam membuat kebijakan sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan ekonomi produktif sebagai regulator belum tertata rapi, karena belum adanya aturan khusus mengenai pemberdayaan ekonomi produktif, yang saat ini hanya berupa SK Wali Nagari Sungai Buluah tentang susunan pengurus kelompok. Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi produktif pemerintah Nagari Sungai Buluah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman mengenai tugas wali nagari, serta Peraturan Nagari Sungai

Buluah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Sungai Buluah.

Dinamisor, pemerintah berperan dalam menggerakkan partisipasi multipihak ketika terjadi stagnansi dalam proses pemberdayaan. Sebagai dinamisor pemerintah berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan secara intensif baik melalui tim penyuluh atau badan tertentu. Peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan ekonomi produktif sebagai dinamisor belum maksimal, karena pelatihannya baru diadakan satu kali, yaitu selama 20 hari, jadi kelompok masi membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam. Serta kelompok juga masih membutuhkan pelatihan atau bimbingan mengenai pemasaran produk, sebab saat ini kelompok hanya bisa memproduksi hasil dari kegiatan ekonomi produktif, tetapi kurang dalam memasarkan produknya. Pemasaran hasil produksi saat ini hanya dilakukan oleh masing masing kelompok melalui promosi di akun sosial media, sedangkan pemerintah nagari belum mencarikan atau membantu dalam pemasaran produk.

Fasilitator, pemerintah berperan dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberdayaan. Peran Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan ekonomi produktif sebagai fasilitator belum maksimal, karena masi ada hal yang dibutuhkan oleh kelompok. Fasilitas yang diberikan kepada kelompok ekonomi produktif terbatas. Keterbatasan alat yang dimiliki tersebut membuat hasilnya kurang produktif. Walaupun pada kegiatan ekonomi produktif pemerintah nagari Sungai Buluah memfasilitasi tempat, serta peralatan produksi yang dibutuhkan dalam masing masing kegiatan. Akan tetapi masih ada alat alat yang dibutuhkan oleh kelompok untuk meningkatkan produktifitas hasilnya. Pada kelompok menjahit, tidak memiliki mesin sarikaya, padahal mesin ini sangat dbutuhkan oleh kelompok untuk merapikan pinggiran atau tepi kain, sehingga untuk saat ini kelompok masih mengupahkannya ke tempat yang lain. Pada kelompok Bordir, variasi warna dan model benang serta keterbatasan bahan yang dimiliki oleh kelompok. Pada kelompok karangany bunga variaasi bunga dan hiasan lainnya juga terbatas. Sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan lagi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh kelompok dalam menghasilkan produk.

Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari melalui kegiatan ekonomi produktif, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaannya, baik pada kelompok menjahit maju bersama, kelompok bordir berkah, maupun kelompok karangan bunga.

Telah ditemukan tiga hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif di Nagari Sungai Buluah, diantaranya (1) adanya fasilitas yang disediakan untuk kelompok ekonomi produktif, (2) motivasi dalam diri kelompok untuk meningkatkan kemampuan pada kegiatan ekonomi produktif, (3) akses jalan yang mudah dijangkau.

Pertama, adanya fasilitas yang disediakan untuk kelompok. Pemerintah nagari telah menyediakan fasilitas untuk masing masing kelompok ekonomi produktif, mulai dari tempat, dan alat alat produksi, meskipun masi ada peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kedua, motivasi dalam diri untuk meningkatkan kemampuan pada kegiatan ekonomi produktif. Adanya keinginan kelompok untuk megikuti pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah nagari, dilihat dari kehadiran anggota kelompok ketika mengikuti pelatihan tersebut, walaupun masi ada kelompok yang terlambat dan tidak disiplin waktu ketika pelatihan.

Ketiga, akses jalan yang mudah dijangkau. Tempat yang disediakan oleh pemerintah nagari untuk kegiatan ekonomi produktif, baik itu untuk kelompok menjahit, kelompok birdir, maupun kelompok karangan bunga, mudah dijangkau oleh masyarakat, karena tempatnya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, dan berada di dekat jalan raya, serta akses jalan menuju tempat tersebut mudah.

Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari melalui kegiatan ekonomi produktif, terdapat kendala atau faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah, baik itu pada kelompok menjahit maju bersama, kelompok bordir berkah, maupun kelompok karangan bunga.

Telah ditemukan tiga hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif di Nagari Sungai Buluah, diantaranya (1) kurangnya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produktif (2) kurangnya kedisiplinan anggota (3) kurangnya pemasaran.

Pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Pemerintah nagari sudah menyediakan fasilitas untuk kelompok ekonomi produktif, akan tetapi fasilitas yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan kelompok. Masih ada beberapa alat yang dibutuhkan kelompok untuk meningkatkan hasil produksi.

Kedua, kurangnya kedisiplinan anggota. Kedisiplinan kelompok ekonomi produktif menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan, karena ketidakdisiplinan tersebut membuat banyaknya waktu terbuang. Anggota kelompok masi banyak yang terlambat ketika dilakukannya pelatihan, sehingga waktu yang telah disediakan banyak terbuang.

Ketiga, ialah kurangnya pemasaran. Pemasaran pada kelompok ekonomi produktif masih kurang, kelompok kurang melakukan promosi untuk hasil produksinya, dan dari pemerintah nagari juga belum maksimal dalam membantu promosi atau mencari mitra untuk pemasaran produk. Promosi yang dilakukan hanya melalui media sosial anggota kelompok.

PENUTUP

Peran Pemerintah Nagari dalam pemberdayaan melalui kegiatan ekonomi produktif ialah (a) sebagai regulator, belum adanya aturan khusus mengenai pemberdayaan ekonomi produktif, pemerintah nagari berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman mengenai tugas wali nagari dan Peraturan Nagari Sungai Buluah mengenai kewenangan nagari, serta pemerintah nagari mengeluarkan SK Wali Nagari tentang susunan kepengurusan kelompok ekonomi produktif. (b) Sebagai dinamisator, pemerintah nagari memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok ekonomi produktif melalui penyuluh selama 20 hari, walaupun kelompok masih membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam. (c) Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif, walaupun masih ada beberapa alat yang dibutuhkan oleh kelompok.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif ialah, *pertama* adanya fasilitas yang disediakan untuk kelompok, *kedua* motivasi dalam diri untuk meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi produktif, *ketiga* akses jalan yang mudah dijangkau.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif ialah, *pertama* keterbatasan sarana yang dimiliki, *kedua* kurangnya pemasaran produk dan promosi, *ketiga* kurangnya kedisiplinan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191-198.
- Musa, M. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial dan Kemanusiaan Volume 8 Nomor 1*.
- Moelong, L. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 890-899.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Manajemen Perangkat Nagari.
- Peraturan Nagari Sungai Buluah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.